BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan mengatur kepentingan suatu Bangsa dan Negara. Pemerintah dibentuk untuk melaksanakan suatu aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu instansi pemerintahan merupakan peningkatan pelayanan yang berkualitas keamanan, kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat 5 fungsi Pemerintahan yang harus dilaksanakan yaitu fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Pemerintah ada untuk memberikan solusi bagi setiap kepentingan masyarakat salah satunya dalam hal pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Indonesia Pada era Pemerintahan Presiden Jokowi menggerakan setiap Pemerintah Di Indonesia untuk mengisi setiap pembangunan Di Indonesia dalam mencapai kepentingan masyarakat. Salah satu daerah yang sedang melakukan proses pembangunan dari tingkat pemerintahan terendah sampai tertinggi adalah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan berbagai kebijakan dalam hal pembangunan, hal ini sesuai dengan tugas utama Pemerintah. Pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam hal pembangunan apabila pembangunan di setiap daerah berjalan secara efektif.

Efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Salah satu faktor pendukung suatu program Pemerintah efektif atau tidaknya dilihat dari partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun pedesaan, karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Untuk itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Merencanakan suatu program bukan merupakan pekerjaan yang mudah, suatu program yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut, semakin beragam dan kompleks kebutuhan dan permasalahan dari kelompok sasaran, akan semakin rumit penyusunan perencanaan suatu program. Masyarakat (kelompok sasaran) mempunyai karakteristik tertentu. Masyarakat memiliki kebutuhan dan minat yang beragram, kemampuan mereka dalam menganalisis situasi yang dihadapi juga

beragam, kemampuan mereka dalam mengambil keputusan juga tidak sama antar kelompok masyarakat satu dengan lainnya.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi msyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Untuk meningkatkan pembangunan di kota bandung maka pemerintah melakukan suatu program dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan program PIPPK. Pemerintah Kota Bandung sangat percaya bahwa program ini sangat membantu untuk kesejahteraan masyarakat. Berlandaskan tiga hal yaitu inovasi, kolaborasi dan desentralisasi. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), merupakan salah satu program unggulan Kota Bandung yang didasarkan pada sistem desentralisasi,

PIPPK adalah program yang dibuat oleh pemerintah, memang bukan bantuan secara langsung, melainkan dana hibah yang diberikan kepada masyarakat dan dana yang diberikan pemerintah tidaklah sama setiap masing-masing RW tetatapi kendati pemerintah sudah menetapkan anggaran sebesar 100 juta. Sesuai namanya, program percepatan pembangunan melibatkan langsung partisipasi masyarakat melalui

lembaga kemasyarakatan Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Kebijakan pemerintah terkait Program PIPPK dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan di Kota Bandung dan lurah akan bekerjasama dengan RW/RT setempat. Maka dari itu Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung no. 281 tahun 2015 tanggal 15 Maret sebagaimana telah diubah dengan nomor 436 tahun 2015 tanggal 11 Mei tahun 2015, Terkait hal itu, dalam PIPPK peran Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM dan RW) menjadi sangat penting, namun dari hasil evaluasi program PIPPK yang dilakukan oleh bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung, sampai saat ini menunjukkan bahwa PIPPK masih belum menyentuh secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat di kelurahan. Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan dan 153 Kelurahan yang seluruhnya mendapatkan perlakukan yang sama terkait program PIPPK.

Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang memiliki peran penting di daerah, terutama dalam bidang pembangunan. Pentingnya peran kecamatan disebabkan adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Perubahan kedudukan kecamtan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan kreativitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seseuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kecamatan Coblong merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandung yang melaksanakan kebijakan PIPPK. Kecamatan Coblong, terdiri atas 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Dago, Kelurahan Sekeloa, Kelurhan Sadang Serang, Kelurahan Lebak Gede, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kelurahan Cipaganti.

Penunjang pelaksanaan kegiatan PIPPK yang ada di wilayah Kecamatan Coblong terdiri dari 75 Rukun Warga (RW), 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 6 Karang Taruna dan 6 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Total anggaran PIPPK di Kecamatan Coblong sebesar RP.9.316.459.455. Sedangkan realisasi anggaranya sebesar Rp.8.996,744,863, dengan kata lain penyerapan anggaranya sebesar 96,57% (Sumber dari Rekapitulasi PIPPK kecamatan Coblong Tahun 2017).

Gambar 1.1

Rekapitulasi PIPPK kecamatan Coblong



(sumber: kecamtan coblong : 2017)

Gambar 1.2

Rekapitulasi Realisasi PIPPK Kelurahan

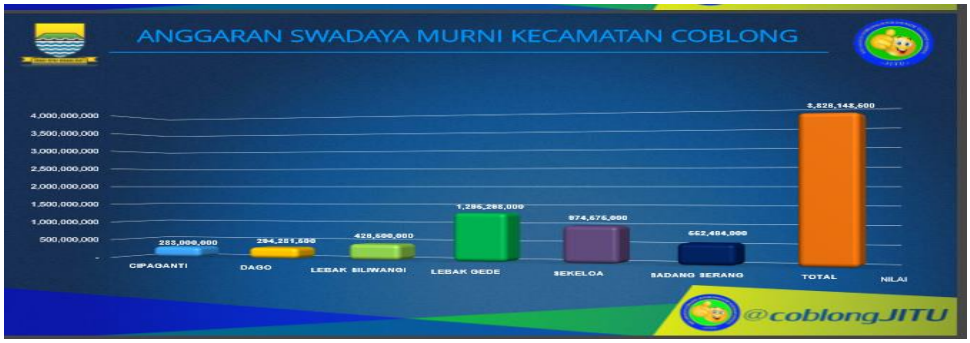


(Sumber: Kecamatan Coblong)

Penyerapan anggaran menjadi slah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan PIPPK ini, meskipun penyerpan anggaran seacara keseluruhan diatas 95%, namun masih ada salah satu kelurahan yang penyerapan anggaranya kurang dari 95% yaitu Kelurahan Dago sebesar 91% dengan uraian penyerapan angggaran sebagai berikut LPM 68,06%, PKK 93,32%, Karang Taruna 62,52% dan RW 94,54%. Sehingga pelaksana PIPPK khususnya di Kelurahan Dago berdasarkan penyerapan anggaranya dapat dikatakan belum terealisasi sesuai target.

Gambar 1.3

Anggaran Swadaya Murni Kecamatan Coblong



(sumber: kecamtan coblong)

Ruang lingkup pelaksanaan PIPPK juga belum semua terlaksana, contoh hampir semua RW ruang lingkup PIPPK yang dilaksanakan hanya berisar pada infastruktur dan pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan (Kamtibmas) sedangkan ruang lingkup lain, seperti pemberdayaan Inovasi ekonomi lokal tidak satipun RW yang melaksanakanya. Ruang lingkup pelatihan dalam rangka Usaha Ekonomi Produktif (EUP) juga bagi karang taruna belum terlaksana, sehingga PIPPK di Kelurahan Dago belum Terlaksana seluruhnya.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan indikasi masalah mengenai persoalan yang berkenaan dengan program PIPPK selama ini, khusus nya di Kelurahan Dago. Masalah pertama yakni terhambatnya proses pembangunan yang terjadi karena faktor cuaca dan mengakibatkan Pembangunan yang terkendala. Hal ini mengakibatkan program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan dan Kewilayahan (PIPPK) yang sudah di rencanakan oleh masyarakat setemapat berjalan kurang efektif dan banyak pembangunan yang tertunda. Sedangkan dana program PIPPK keluar dari awal tahun sampai bulan maret dengan kondisi cuaca yang terjadi

mengakibatkan program yang sudah direncanakan oleh masyarakt terhambat dan harus menunggu tahun berikutnya.

Permasalahan yang kedua, seperti yang disampaikan oleh lurah kelurahan Dago bahwasanya masyarakat sekitar kelurahan tersebut sebagian besar merupakan masyarakat heterogen. Hal tersebut dijelaskan dengan mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut bukan warga asli. Hal tersebut yang menyebabkan rendahnya partisipasi terhadap lingkungan sekitar karena mereka merasa bukan warga asli daerah tersebut yang berwajiban untuk berpartisipasi dalam bentuk tenaga. Partisipasi yang umum diberikan oleh masyarakat daerah tersebut hanya berbentuk dukungan dana tanpa bantuan bentuk kegiatan langsung.

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas mengenai Progaram Inovasi Pembangunan Pemberdayaan dan Kewilayahan di Kelurahan Dago masih adanya permasalahan yang dapat membuat program tersebut tidak efektif yang akan mengakibatkan tidak akan tercapainnya tujuan dari Pemerintah yang ingin membuat masrayakat menjadi sejahtera khususnya dalam bidang Pembangunan. Penelitian terkait PIPPK sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Atalia Praratya pada tahun 2017 di Bandung, dengan Judul "Pengaruh Komunikasi Internasional Dan Kepemimpinan Lurah Terhadap Kinerja Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung", dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan teori Sugiono, (2009:12) penelitian tersebut memfokusan penelitiannya terhadap komunikasi lurah dan kepemimpinanya.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal para Lurah di Kota Bandung belum efektif mendukung Kinerja PIPPK Kota Bandung. Beberapa faktor penyebabnya karena para Lurah bekerja cenderung kepada pencapaian tujuan. Persamaan dengan peneiti diatas secara garis besar yaitu membahas Pengaruh Komunikasi Internasional Dan Kepemimpinan Lurah Terhadap Kinerja PIPPK sedangkan dalam penelitian ini membahas secara lebih mendalam yaitu Penagaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas PIPPK tersebut.

Penelitian lainya dilakukan oleh Ajeng Sriwahyuni "Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas kegitan Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SPP PNPM) Mandiri di Desa Talangsari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut", pada tahun 2015 dengan menggunakan teori variabel X (Uphoff and Cohen dalam Yadav 1979) dan variabel Y (Depagri 2008 dalam Sipayung 2013) Metode penelitian diatas menggunakan metode pendekatan Kuantitatif. Tujuan dari peneliti tersebut menganalisis tingkat partisipasi masyarakat (perempuan) dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri di Desa Talagasari dan menganalisis efektivitas kegiatan SPP PNPM Mandiri di Desa Talagasari. Hasil dari peneliti tersebut partispasi masyarakat sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang tidak bersifat top-down. Selain melihat tingkat partisipasi masyarakat (khususnya perempuan, penelitian ini juga menganalisi efektivitas kegiatan SPP PNPM dengan melihat capaian yang telah diperoleh dengan tujuan awal kegiatan SPP PNPM.

Penelitian lainya juga dilakukakn oleh Nurhafni "Partisipasi Masyrakat terhadap Efektivitas pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru", pada tahun 2016 dengan menggunakan teori Diana Conyers (1991). Metode penelitian ini adalah

penelitian deskriptif menggunakan pedekatan kualitatif, Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian diatas Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula. Pengelolaan sampah yang baik bukan untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga untuk keindahan lingkungan. Yang dimaksud meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi ganguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup

Pada penelitian-penelitian yang disebutkan diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan tersebut adalah kesamaan fokus penelitian yang berfokus pada pasrtisipasi masyarakat terhadap Efektivitas program yang terkait. Sedangkan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian, teori yang digunakan dan tahun pelaksanaan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan untuk pelitian ini juga berbeda dengan penelitian. Peneliti memfokuskan penelitian ini di kelurahan Dago, Kecamatan Coblong Kota Bandung. Hal tersebut dikarenakan kelurahan dago merupakan salah satu kelurahan yang belum melaksanakan program PIPPK dengan baik dari semua kelurahan yang ada di kecamatan coblong. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kelurahan dago dan mencari masalah yang terjadi di kelurahan tersebut.

Berangkat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam pembangunan maka dari itu penulis mengambil judul **"PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN DAN KEWILAYAHAN (PIPPK)".**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaiamana Partisipasi Masyarakat dalam PIPPK di Kelurahan Dago?
2. Bagaimana Efektivitas PIPPK di Kelurahan Dago?
3. Berapa besar Pengaruh antara Partisipasi Masyarakat terahadap Efektivitas pada program PIPPK?

1. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kelurahan Dago. Sedangkan tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Dago
2. Untuk mengetahui Efektivitas PIPPK di Kelurahan Dago
3. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Partisipasi masyarakat khususnya pada program PIPPK

1. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan yang bersifat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. **Kegunaan Teoritis**

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran dalam Ilmu Pemerintahan tentang teori Partisipasi dan Efektivitas.

2. **Kegunaan Praktis**

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah kelurahan Dago untuk peningkatan program PIPPK.

1. Bagi peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengalaman, serta semangat belajar peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas PIPPK di kelurahan Dago.

2. Bagi Masyarakat

   Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi.

3. Bagi Instansi

   Diharapkan penelitian ini berguna sebagai masukan bagi Kelurahan yang ada di Kota Bandung khususnya, Kelurahan Dago Kecamatan Coblong mengenai pengaruh partisipasi masyarakat terhadap PIPPK di kelurahan dago.